

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Waridhatul Risqiyah*, Ahmad Yunani

Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat

*waridhatulrisqiyah@gmail.com

Abstract

This study has the objectives, namely (1) to know jointly (simultaneously) the effect of economic growth, local revenue, and general allocation funds on the capital expenditure budget allocation in the regional government of Central Kalimantan province; (2) to find out the most dominant factor influencing the allocation of the capital expenditure budget in the regional government of Central Kalimantan province.

This research is quantitative research with secondary time series data. While the location of this research is Central Kalimantan Province. The object of this research is economic growth, locally generated revenue, general allocation funds, and capital expenditure budget allocation to the regional government of Central Kalimantan province from 2004-to 2018. The data obtained is then processed using multiple linear regression equation analysis with the help of the SPSS version 26.0 program.

The results of this study show that (1) simultaneously, the variables of economic growth, locally generated revenue and general allocation funds had a significant effect on the capital expenditure budget allocation in the regional government of Central Kalimantan province from 2004-to 2018 (2) The results also show that the General Allocation Fund is the most dominant factor affecting the allocation of capital expenditures.

Keywords: *Local Own Income, economic growth, general allocation funds, and capital expenditures.*

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu untuk (1) mengetahui secara bersama-sama (simultan) pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap alokasi anggaran belanja modal pada pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah; (2) mengetahui faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi alokasi anggaran belanja modal pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah.

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan data sekunder time series. Sedangkan lokasi penelitian ini adalah Provinsi Kalimantan Tengah, dan objek penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan alokasi anggaran belanja modal pada pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2004-2018. Data yang sudah diperoleh kemudian diolah menggunakan analisis persamaan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 26.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal pada pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2004-2018, (2) Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi alokasi belanja modal.

Kata kunci: *pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum dan belanja modal.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memiliki tujuan yaitu untuk memperlaju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, menjaga hubungan yang harmonis antaradaerah dan peningkatan terhadap pelayanan publik yang semakin baik di daerah masing-masing. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, optimalisasi anggaran perlu dilakukan secara efisiensi dan efektivitas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas publik guna menunjang pelaksanaan kegiatan tugas pemerintah yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam desentralisasi fiskal, pembiayaan pengeluaran dalam rangka memberikan pelayanan publik tersebut pemerintah daerah diberikan hak untuk menggali setiap potensi daerah yang dimilikinya sebagai sumber pendapatan. Namun, kemampuan keuangan setiap daerah tidaklah sama, hal tersebut akan menimbulkan adanya kesenjangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk menjawab kesenjangan fiskal ini, dalam pelaksanaan desentralisasi pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan kepada masing-masing daerah untuk digunakan dalam mendanai berbagai macam kegiatan operasional. Dengan adanya tambahan dana transfer dari pusat, pemerintah daerah diharapkan mampu mengalokasikan dana tersebut dalam anggaran belanja modal guna menambah asset tetap yang tertuang dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana dalam peningkatan pelayanan publik. Dengan penambahan sarana prasarana akan membantu mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Table 1
Realisasi Belanja Modal Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2014-2018 (Dalam Rupiah)

No	Tahun	Realisasi Belanja Modal
1	2014	814.507.824
2	2015	959.141.543
3	2016	783.864.793
4	2017	565.245.264
5	2018	1.441.522.178

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019

Dari tabel 1 diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja modal pada pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan dan berfluktuasi setiap tahunnya. Dalam tiga tahun pertama 2015-2017 realisasi belanja modal

terus mengalami penurunan. Selanjutnya ditahun berikutnya pada tahun 2018 terjadi peningkatan yang cukup besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya sebesar Rp.565.245.264 realisasi belanja modal pada tahun 2018 mencapai Rp. 1.441.522.178 ini merupakan realisasi belanja modal yang tertinggi selama lima tahun terakhir.

Dari data diatas berbagai permasalahan yang ada dalam pengalokasian anggaran belanja modal menunjukkan angka yang berfluktuatif setiap tahunnya. Dalam pendanaan untuk anggaran belanja modal ini tergantung kepada penerimaan pendapatan asli daerah ataupun juga bantuan dana transfer dari pusat.

Pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal pada pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah (2) faktor mana yang paling dominan mempengaruhi alokasi anggaran belanja modal pada pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah.

Tujuan dari penelitian ini untuk (1) menganalisis secara bersama pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap alokasi anggaran belanja modal pada pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah (2) mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi alokasi anggaran belanja modal pada pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan pengalokasian anggaran belanja modal bahwa terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU yang harus selalu diperhatikan keadaannya.

KAJIAN PUSTAKA

Anggaran Belanja Daerah

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah perlu mengelola suatu rancangan yang tersusun, dimana rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang akan menjadi acuan dalam setiap pelaksanaan tugas hak dan kewajiban pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, belanja daerah merupakan semua kewajiban pemerintah daerah yang kemudian diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam suatu periode tahun anggaran berkenaan. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya pada APBD yang tertuang dalam PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2019, belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai urusan pemerintah yang wajib terkait pelayanan dasar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2019 tentang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta perpedoman pada harga satuan regional dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar teknis. Kemudian, analisis standar belanja harga satuan regional sebagai pedoman untuk urusan pelayanan dasar pemerintahan wajib yang tidak terkait dan urusan pemerintahan pilihan. Dalam hal ini, belanja daerah harus dialokasikan secara adil dan merata guna memberikan pelayanan umum agar dapat dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat.

Belanja Modal

Berdasarkan Direktorat Jenderal Perimbangan, belanja modal merupakan anggaran pengeluaran untuk memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberikan nilai guna lebih dari satu periode. Klasifikasi belanja modal terdiri dari belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan dan asset tetap.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai terminologi yang menyatakan ekspansi kapasitas produksi yang menyebabkan bertambahnya produksi suatu barang dan jasa dalam perekonomian (Karya & Syamsuddin, 2016). Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan jumlah produksi suatu barang dan jasa yang kemudian dalam jangka panjang akan meningkatkan output perkapita, sehingga menyebabkan perekonomian suatu negara dapat berkembang dan berubah dari masa ke masa. Ekonomi yang tumbuh sudah seharusnya mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik kepada penduduk dan masyarakat dalam suatu negara yang bersangkutan.

Menurut (Jhingan M., 2012) ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yakni faktor ekonomi yang meliputi sumber daya alam, akumulasi modal, organisasi serta skala produksi dan pembagian kerja. Sedangkan untuk faktor non-ekonomi meliputi faktor sosial, sumber daya manusia, politik dan administratif. Diantara faktor-faktor tersebut faktor akumulasi modal merupakan kunci utama proses pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana yang layak para investor akan tertarik untuk berinvestasi di daerah tersebut, hal ini tentu saja mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dengan adanya tambahan investor.

Dalam teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar investasi memberikan peranan penting dalam proses pertumbuhan ekonomi, dengan adanya investasi dapat menciptakan

pendapatan dan disisi lain investasi memberikan kenaikan kapasitas produksi melalui peningkatan stok modal. Penelitian hubungan pertumbuhan ekonomi regional dengan pengeluaran pemerintah yang dilakukan oleh Sodik, (2007) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin memiliki hubungan yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menandakan bahwa pengeluaran pembangunan sangat diperlukan oleh suatu daerah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut pasal 1 ayat 13 UU No. 13 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan pendapatan daerah merupakan penambahan nilai kekayaan bersih yang diperoleh pemerintah daerah dalam periode tahun bersangkutan. PAD atau Pendapatan Asli Daerah merupakan semua pemasukan yang diperoleh daerah dari sumber ekonomi. Adapun sumber PAD diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan salah satu komponen dana transfer yang bersumber dari pendapatan APBN yang diberikan Pemerintah pusat kepada daerah, penggunaan DAU dalam rangka pelaksanaan desentralisasi harus digunakan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dan mendanai kebutuhan daerah otonom.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Agustina Wulandari, (2013) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2013-2011)” menunjukkan bahwa PDRB dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian Fahri Eka Oktara (2013) dengan judul “Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah”, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara DAU, DAK terhadap belanja modal, sedangkan PAD tidak menunjukkan hubungan yang erat terhadap belanja modal.

Penelitian Nanda Dwi Novalia (2016) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja

Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung”, menerangkan bahwa PDRB dan PAD tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal dan hanya variabel DAU yang memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

Penelitian Sri Mulyani (2017) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015)”, menunjukkan PAD dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal dan DAU signifikan terhadap belanja modal, kemudian untuk pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh PAD terhadap belanja modal.

Penelitian Muhammad Syukri dan Hinaya (2019) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan”, bahwa hanya menunjukkan PAD yang memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi dan DAU tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal.

METODE

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan alokasi anggaran belanja modal pada pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu penelitian 2004-2018. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang berupa analisis pada data numeric (berupa angka) untuk mengetahui besaran atau jumlah dari suatu objek dalam penelitian. Unit analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan data sekunder dalam bentuk *time series* kurun waktu selama lima belas tahun, yang mana berbagai data bersumber dari publikasi yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Definisi Operasional Variabel

Belanja modal adalah realisasi yang termuat dalam Laporan Realisasi APBD provinsi Kalimantan Tengah. Dalam penelitian ini satuan belanja modal dinyatakan dalam Rupiah (Rupiah).

Pertumbuhan ekonomi dinyatakan dalam satuan persentase yang nilainya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi Periode}_t = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang termuat dalam Laporan Realisasi APBD provinsi Kalimantan Tengah dan dinyatakan dalam satuan Rupiah (Rp). Untuk variabel PAD bersumber dari:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$$

Dana Alokasi Umum merupakan dana dari pemerintah pusat yang termuat dalam pos dana perimbangan di Laporan Realisasi APBD provinsi Kalimantan Tengah yang dinyatakan dalam satuan Rupiah (Rp).

Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data dan informasi yang dikelola dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data resmi yang diperoleh dari instansi pemerintah dan pihak yang mengelola yang berkaitan tentang judul penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini model yang digunakan yakni analisis regresi linier berganda, yang mana untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terkait. Model persamaan diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \varepsilon$$

Dari Fungsi diatas maka ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural. Sehingga persamaannya menjadi seperti berikut:

$$\text{Ln}Y = \text{ln}\beta_0 + \beta_1 \text{Ln}X_{1t} + \beta_2 \text{Ln}X_{2t} + \beta_3 \text{Ln}X_{3t} + \varepsilon$$

Dimana:

- Ln : Logaritma Natural
- Y : Belanja Modal (Dalam satuan rupiah)
- β_0 : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi
- X1 : Pertumbuhan Ekonomi (%)
- X2 : Pendapatan Asli Daerah (Rp)

X3 : Dana Alokasi Umum (Rp)

t : Tahun

ε : Kesalahan Pengganggu

Uji F-Statistik

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang digunakan dalam model regresi secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengambilan keputusan dalam pengujian ini yaitu apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05 (alpha 5%), artinya H_0 dapat ditolak dan apabila nilai F hitung $>$ F table dengan demikian H_0 juga ditolak.

Uji T-Statistik

Menggunakan Uji t-statistik, dilakukan untuk mengetahui apakah secara masing-masing variabel bebas dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel terikat.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sebesar besar pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Nilai (R^2) besarnya berada diantara 0 dan 1 ($0 \leq (R^2) \leq 1$). Apabila R^2 semakin besar dan mendekati 1 (satu), artinya model yang digunakan dapat dikatakan semakin bagus dan pengaruh antara variabel terikat Y semakin kuat (erat hubungannya).

HASIL DAN ANALISIS

Deskripsi Statistik Variabel Penelitian

Belanja Modal

Table 2
Realisasi Belanja Modal Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2004 – 2018

No	Tahun	Realisasi Belanja Modal (Rp)
1.	2004	233.193.833
2.	2005	171.364.638
3.	2006	386.579.527
4.	2007	443.120.370
5.	2008	605.443.910
6.	2009	626.858.645
7.	2010	541.293.289
8.	2011	432.339.992
9.	2012	635.814.262
10.	2013	940.602.626
11.	2014	814.507.824
12.	2015	959.141.543
13.	2016	783.864.793

14.	2017	565.245.264
15.	2018	1.441.522.178

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat selama kurun waktu lima belas tahun data menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi peningkatan tersebut mengalami penurunan ditahun 2009-2011, hal ini bisa saja terjadi dikarenakan dampak dari krisis ekonomi ditahun 2008 yang mengakibatkan pemerintah daerah setempat melakukan pengurangan pada anggaran belanja modal. Setelah terjadi penurunan anggaran belanja modal selama 2 tahun berturut-turut yang disebabkan dari adanya krisis ekonomi, pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah kembali memulihkan kondisi ekonominya dengan adanya peningkatan anggaran belanja modal ditahun 2012 guna menambah asset daerah untuk pelayanan publik. Kenaikan realisasi anggaran belanja modal yang cukup signifikan terjadi di tahun 2018.

Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 3

**Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2004-2018**

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1.	2004	5,56
2.	2005	5,90
3.	2006	5,84
4.	2007	6,06
5.	2008	6,17
6.	2009	5,57
7.	2010	6,50
8.	2011	6,77
9.	2012	6,87
10.	2013	7,38
11.	2014	6,20
12.	2015	7,01
13.	2016	6,35
14.	2017	6,72
15.	2018	5,64

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah

Dari tabel 2 diatas diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan selama kurun waktu 2004-2018. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 7,38%, sedangkan untuk nilai pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2004 yakni sebesar 5,56%. Kenaikan pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan ketidakstabilan setiap tahunnya. Salah satu sektor unggulan yang mendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi

Kalimantan Tengah yakni sektor pertanian dan perkebunan, dimana luas wilayah Kalimantan Tengah 80% didominasi oleh sektor kehutanan.

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum

Table 4
Realisasi PAD dan DAU
Tahun 2004-2018

No	Tahun	PAD (Rp)	DAU (Rp)
1.	2004	199.980.656	274.597.000
2.	2005	166.052.623	287.575.611
3.	2006	215.664.729	552.000.000
4.	2007	273.180.273	571.290.000
5.	2008	391.105.600	670.213.090
6.	2009	382.020.409	694.822.206
7.	2010	504.217.390	707.880.493
8.	2011	832.901.338	795.816.335
9.	2012	945.362.708	951.256.068
10.	2013	1.093.821.486	1.062.516.940
11.	2014	1.253.716.041	1.152.428.738
12.	2015	1.174.969.267	1.280.595.848
13.	2016	1.158.360.858	1.294.850.243
14.	2017	1.342.330.618	1.574.382.856
15.	2018	1.594.702.206	1.603.623.745

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 2019

Dari data table 4 diatas dapat kita lihat selama kurun waktu lima belas tahun terakhir pemerintah selalu mengoptimalkan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah hal ini terbukti dari angka PAD yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tidak hanya PAD yang mengalami peningkatan selama lima belas tahun terakhir, Dana Alokasi Umum yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat juga mengalami peningkatan.

Analisis Data

Regresi Linier Berganda

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi (bi)	t hitung	Beta	Sig
Konstanta	2.199			
PertumbuhanEkonomi (X1)	-.858	-.869	-.139	.403
PAD (X2)	.039	.130	.056	.899
DAU (X3)	.914	2.235	.912	.047
R square (R ²) = .816	F hitung = 16.285			
	Sig = .000			

Sumber: Hasil Olah Data SPSS versi 26.0

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 5 dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\text{Ln } Y = 2,199 - 8,58\text{Ln}X1 + 0,39\text{Ln}X2 + 9,14\text{Ln}X3 + \varepsilon$$

Uji F – Statistik

Setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan software SPSS versi 26.0, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 16,285 sedangkan F_{tabel} sebesar 3,59, artinya nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan nilai probabilitas $F_{statistik}$ yaitu $0,000 < 0,05$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang berarti secara bersama-sama (simultan) semua variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, hal ini artinya variabel pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU secara signifikan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah.

Uji T – Statistik

Berdasarkan pada table 5 diperoleh, pada variabel pertumbuhan ekonomi (X1) diperoleh t-hitung sebesar $-869 < t\text{-tabel } 1,79588$ dengan probability value sebesar 0,403 menunjukkan angka yang lebih besar daripada taraf nyata dalam penelitian yaitu 0,05 dengan nilai koefisien regresi pertumbuhan ekonomi sebesar -858 hal ini berarti tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan variabel pertumbuhan ekonomi (X1) terhadap alokasi belanja modal (Y) pada pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu 2004 – 2018. Untuk variabel PAD (X2) menunjukkan nilai t-hitung $130 < t\text{-tabel } 1,79588$ dan nilai *Sig.* $0,899 > 0,05$ dengan nilai koefisien regresi PAD sebesar 0.39 hal ini berarti tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan, sedangkan pada variabel DAU (X3) diperoleh nilai t hitung sebesar $2,235 > t\text{-table } 1,79588$ dengan probability value $0,047 < 0,05$ maka ada pengaruh signifikan dan positif dan variabel DAU (X3) terhadap alokasi belanja modal (Y) pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu 2004 – 2018 dengan nilai koefisien regresi DAU sebesar 0.39.

Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk nilai koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada table 5 diperoleh nilai R^2 yakni sebesar 0,816 yang artinya 81,6% alokasi belanja modal pemerintah daerah di provinsi Kalimantan Tengah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum. Sedangkan, sisanya sebesar 18,4% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang belum diteliti.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian maka implikasi dari penelitian ini yaitu untuk menentukan seberapa besar pengaruh dari variabel PAD, pertumbuhan ekonomi DAU terhadap alokasi

anggaran belanja modal pada pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah, serta sebagai acuan untuk membuat kebijakan dalam pengalokasian anggaran belanja modal di Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2004-2018.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan diantaranya: (1) Objek dari penelitian ini hanya terbatas pada data pusat provinsi Kalimantan Tengah saja, sehingga hasil data yang diperoleh masih cukup sedikit dan data belum terealisasi secara baik ke seluruh daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Tengah; (2) tidak memuat rincian terkait penggunaan alokasi DAU dan PAD yang memberikan nilai kontribusi terhadap belanja modal; (3) dalam penelitian ini juga tidak membahas mengenai penyusunan kebijakan dalam anggaran belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah setempat.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) hasil penelitian ini secara simultan atau bersama-sama pertumbuhan ekonomi (X_1), Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_2), dan Dana Alokasi Umum (DAU) (X_3) berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dalam kurun waktu penelitian selama lima belas tahun dari tahun 2004-2018; (2) variabel Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi alokasi belanja modal pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu 2004-2018 .

Saran

Setelah penulis melakukan penelitian ini, adapun saran yang ingin disampaikan yaitu: diharapkan penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan referensi dalam membuat kebijakan yang mengutamakan prinsip efektivitas dan efisiensi serta penghematan dalam pengalokasian belanja modal yang sesuai dengan prioritas dalam mendukung program strategi daerah. Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah masih perlu berbenah membuat strategi serta inovasi-inovasi terbaru dalam menggali potensi untuk meningkatkan PAD. Salah satunya dengan memperbaiki basis kinerja yang lebih efektif dan efisien melakukan perencanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban dan optimalisasi pengawasan dalam mengelola penerimaan daerah. Perbaikan jasa layanan, peningkatan fasilitas publik dan memberikan edukasi serta sosialisasi akan membuat kesadaran wajib pajak meningkat dan

mendorong peningkatan kontribusi PAD terhadap APBD. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan untuk mendorong peningkatan PAD dengan begitu sasaran otonomi untuk menghasilkan daerah yang mandiri dapat terwujud

BIBLIOGRAPHY

- Badan Pusat Statistik, (2019). *Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah*.
- Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, (2019). *Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Tengah*.
- Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, (2019). *Dana Alokasi Umum Provinsi Kalimantan Tengah*.
- Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, (2019). *Realisasi Belanja Modal Provinsi Kalimantan Tengah*.
- Gani, I., & Amalia, S. (2015). *Aplikasi Statistik Untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2015). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasanah, E. U., & Danang, S. (2012). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: CAPS.
- Jhingan, M. (2012). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karya, D., & Syamsuddin, S. (2016). *Makroekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kumorotomo, W. (2008). *Desentralisasi Fiskal Politik dan Perubahan kebijakan 1974-2004*. Jakarta: Kencana.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mulyani, S. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015). *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Noor, H. F. (2015). *Ekonomi Publik Edisi 2 Ekonomi Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: PT. Indeks Permata Apautri Media.
- Novalia, N. D. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. *Universitas Lampung*.

- Oktora, F. E. (2013). Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Accountability Vol.2*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Pramesti, G. (2014). *Kupas Tuntas Data Penelitian Dengan SPSS 22*. Jakarta: PT. Elex Media Kompulindo.
- Renyowijoyo, M. (2013). *Akuntansi Sektor Publik* . Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sodik, J. (2007). Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional Studi Kasus Data Panel di Indonesia. *Ekonomi Pembangunan, Universitas Pembangunan Nasional*, 27-36.
- Sugiyono. (2016). *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2012). *makroekonomi modern*. jakarta: pt raja grafindo persada.
- Syukri, M., & Hinaya. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMMA, Universitas Andi Djemma*.
- Tadaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Wulandari, A. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2003-2011). *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi di Indonesia). *JRAK Vol.7*, 11-21.

